

ALUN-ALUN WONOGIRI DIRENOVASI, INI PENJELASAN BUPATI WONOGIRI SUTOPO TENTANG NASIB PKL



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/84/2024/07/17/alun-alun-wonogiri-rev-4291736546.jpeg>

Isi Berita:

RADARSOLO.COM – Kekhawatiran PKL bakal tak bisa berdagang selama Alun-Alun Giri Krida Bakti Wonogiri direvitalisasi, akhirnya terjawab.

Bupati Wonogiri Joko Sutopo menjelaskan, urgensi dari pembangunan alun-alun itu mengingat sudah banyak tindakan tambal sulam dalam perawatan.

"Misalnya keramik pecah dan segala macam. Maka atas kajian lapangan, layak direnovasi," ujar bupati, Rabu (17/7/2024).

Alun-alun juga banyak dimanfaatkan masyarakat. Mulai untuk olahraga pagi hingga berdagang PKL.

"Itu (alun-alun) dibangun 2016. Sudah pas dilakukan renovasi, sudah lewat kajian yang komprehensif," terang bupati yang akrab disapa Jekek.

Soal PKL yang ada di alun-alun, Jekek menuturkan, pihaknya menyadari konsekuensi logis saat ada area dilakukan perbaikan maka akan mengganggu aktivitas yang ada.

Termasuk diantaranya aktivitas PKL saat malam hari.

"Nanti bisa bergeser ke space yang ada. Secara naluriah, teman-teman PKL akan menyesuaikan. Tidak akan ada penutupan atau diliburkan. Tetap boleh buka, namun nanti ada perubahan manajemen ekonominya," papar Jekek.

Nantinya, juga akan dilakukan pengaturan PKL oleh dinas terkait.

Yang jelas, bupati meyakini para PKL secara naluriah akan menyesuaikan.

Diketahui, Alun-Alun Giri Krida Bakti Wonogiri bakal direvitalisasi di 2024. Patung Ir. Soekarno di sekitar alun-alun juga dimungkinkan sedikit bergeser. Adapun revitalisasi alun-alun rencananya dilakukan usai APBD perubahan diketok. Anggaran yang disiapkan untuk revitalisasi sekira Rp 2,9 miliar. (al/wa)

Sumber Berita:

1. <https://radarsolo.jawapos.com/wonogiri/844874062/alun-alun-wonogiri-direnovasi-ini-penjelasan-bupati-joko-sutopo-tentang-nasib-pkl>, “Alun-Alun Wonogiri Direnovasi, Ini Penjelasan Bupati Joko Sutopo tentang Nasib PKL”, tanggal 17 Juli 2024.
2. <https://www.detik.com/jateng/jawa-tengah-meriah/d-7445599/revitalisasi-digeber-alun-alun-dan-stadion-wonogiri-bakal-makin-cantik>, “Revitalisasi Digeber, Alun-alun dan Stadion Wonogiri Bakal Makin Cantik”, tanggal 18 Juli 2024.

Catatan :

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- Perubahan APBD merupakan penyesuaian target kinerja dan/atau prakiraan/rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya untuk dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah.³

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.prosespenyusunanapbd.com/), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² *Ibid*

³ *Ibid*

- Dasar hukum yang melandasi penyusunan perubahan APBD Tahun 2022 antara lain sebagai berikut :
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD dapat dilakukan apabila terjadi:⁴
 1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA. Perkembangan yang tidak sesuai adalah pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, dan lain-lain.
 2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Dapat dilakukan dengan melakukan perubahan APBD.
 3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan. Merupakan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya yang dapat digunakan untuk membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah, melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang, mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS, mendanai kegiatan lanjutan, mendanai program dan kegiatan baru, serta mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan.
 4. Keadaan darurat. Merupakan keadaan yang tidak biasa terjadi dan tidak diinginkan terjadi secara berulang dan berada diluar kendali pemerintah. Dalam situasi ini pemerintah daerah dapat menggunakan anggaran tidak terduga.
 5. Keadaan luar biasa. Merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen) yang didapat dari kenaikan pendapatan atau efisiensi belanja.

⁴ *Ibid*

- Dasar Perubahan APBD diatur di dalam Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi